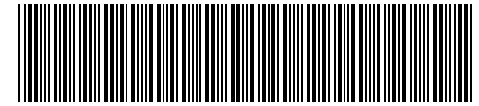




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408779/2024**



DS:4705-6500-9508-6290

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 4. Kode>Nama Satker : (408779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
- Sebesar : Rp. 3.440.273.000 (TIGA MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	3.440.273.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 3.440.273.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024



DS:4705-6500-9508-6290

Satker : (408779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	128.257.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	128.257.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.312.016.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	3.312.016.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



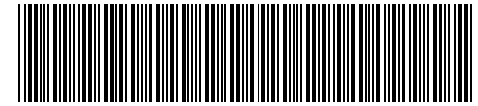
DS:4705-6500-9508-6290

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	: 013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			128.257.000
Kegiatan	: 5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			128.257.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
	: 2. 02	Jumlah fasilitas Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	50.498.000
Rincian Output	: 01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	50.498.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	77.759.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Fasilitas Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	77.759.000
Program	: 013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			3.312.016.000
Kegiatan	: 4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			3.312.016.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
	: 2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum litigasi			
	: 3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap dari usulan kantor wilayah			
	: 4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 4841.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	8,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	84.255.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	8,00	Lembaga	84.255.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4705-6500-9508-6290

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		12,00	Kelompok Masyarakat	147.250.000
Rincian Output		:	01	BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	37.405.000
		:	02	BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	109.845.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		30,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	81.103.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	30,00	Lembaga	81.103.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		30,00	Lembaga, Unit Kerja	97.918.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	30,00	Lembaga	97.918.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		300,00	Orang	2.400.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	300,00	Orang	2.400.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		47,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	501.490.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	47,00	Kegiatan	501.490.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

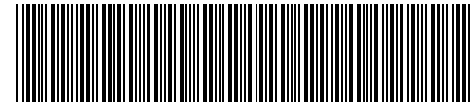
ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024

I B. SUMBER DANA



DS:4705-6500-9508-6290

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 Kode>Nama Satker : (408779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

		Rp.	3.440.273.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2024		Rp.	3.440.273.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4705-6500-9508-6290

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	-	3.440.273	-	-	-	3.440.273		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	128.257	-	-	-	128.257		
5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	128.257	-	-	-	128.257		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	50.498	-	-	-	50.498	19.00	
01	RM	-	50.498	-	-	-	50.498	136	
5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	77.759	-	-	-	77.759	19.00	
01	RM	-	77.759	-	-	-	77.759	136	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.312.016	-	-	-	3.312.016		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	3.312.016	-	-	-	3.312.016		
4841.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	84.255	-	-	-	84.255	19.00	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



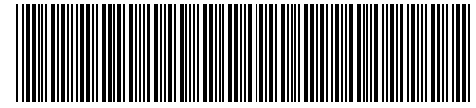
DS:4705-6500-9508-6290

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	84.255	-	-	-	84.255	136	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	147.250	-	-	-	147.250	19.00	
01 RM		-	147.250	-	-	-	147.250	136	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	81.103	-	-	-	81.103	19.00	
01 RM		-	81.103	-	-	-	81.103	136	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	97.918	-	-	-	97.918	19.00	
01 RM		-	97.918	-	-	-	97.918	136	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	19.00	
01 RM		-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	136	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4705-6500-9508-6290

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

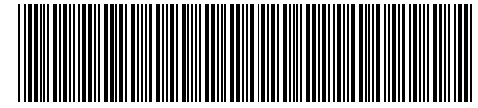
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (19.00 SULAWESI SELATAN / SULAWESI SELATAN)	-	501.490	-	-	-	501.490	19.00	
01	RM	-	501.490	-	-	-	501.490	136	
JUMLAH		-	3.440.273	-	-	-	3.440.273		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4705-6500-9508-6290

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	207.546	470.601	393.171	473.256	368.220	378.025	336.390	508.865	240.415	63.184	600	3.440.273
		BELANJA BARANG	0	207.546	470.601	393.171	473.256	368.220	378.025	336.390	508.865	240.415	63.184	600	3.440.273
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	2.514	13.199	7.000	7.680	7.000	21.195	13.590	28.595	11.830	15.654	0	128.257
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	2.514	13.199	7.000	7.680	7.000	21.195	13.590	28.595	11.830	15.654	0	128.257
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	205.032	457.402	386.171	465.576	361.220	356.830	322.800	480.270	228.585	47.530	600	3.312.016
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	205.032	457.402	386.171	465.576	361.220	356.830	322.800	480.270	228.585	47.530	600	3.312.016

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4705-6500-9508-6290

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408779] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4705-6500-9508-6290

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408779] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001